

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di DPPP Kota Bekasi mengenai peran DPPP dalam pemenuhan kota layak anak dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan teori peran dari Soekanto. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa peran dipengaruhi oleh faktor eksternal diluar dari pelaku utama dalam kegiatan tertentu sesuai dengan status dan kedudukannya, maka Soekanto menyebutkan terdapat 3 indikator peran untuk menentukan keberhasilan dari peran-peran dalam pelaksanaan suatu kegiatan tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi sampai saat ini masih belum optimal dan belum bisa dinobatkan sebagai Kota Layak Anak, hal tersebut mengakibatkan pemenuhan hak anak di Kota Bekasi masih belum terpenuhi dengan baik. Salah satu contoh belum optimalnya Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi ialah Kota Bekasi mengalami penurunan predikat dalam penilaian Kota Layak Anak. Predikat tahun sebelumnya yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam penilaian KLA ialah mendapatkan predikat Nindya yang diperoleh selama tiga tahun berturut-turut dan pada tahun ini turun menjadi peringkat Madya. Hal tersebut disebabkan adanya kekurangan data yang diberikan oleh para Tim Gugus Tugas OPD terkait kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Bahkan tahun ini penilaian Forum Anak Kecamatan mendapatkan nilai kosong, hal tersebut diakibatkan tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh para Forum Anak di tingkat Kecamatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam pelaksanaan pemenuhan KLA di kota Bekasi ialah sebagai turunan dari kementerian PPPA untuk menjadi koordinator pengelolaan kota layak anak di Kota Bekasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

berkedudukan sebagai peran aktif dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Peran aktif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sudah terbilang baik, karena dari ketujuh indikator ruang lingkup 5 klaster hak anak sudah terpenuhi. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi telah menjalankan beberapa program untuk meningkatkan pemenuhan Kota Layak Anak di Kota Bekasi, program tersebut berupa sosialisasi Sekolah Ramah Anak, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual, dan Sosialisasi Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak. Dalam peran aktifnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menjalankan kegiatan Konveksi Hak Anak (KHA) pada tingkat kota sebagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Kota Layak Anak. Dalam pelaksanaannya ini dihadiri oleh para tenaga pendidik, anggota Forum Anak Kota Bekasi, Dunia Usaha, Tim Gugus Tugas dan OPD terkait.

Dalam penerapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi pun dapat dibilang belum optimal, karena dalam penerapannya sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan SRA sesuai dengan 4 rumus SRA yaitu 3 Pilar, 4 konsep, 5 prinsip dan 6 komponen. 3 pilar itu ada satuan Pendidikan, orang tua dan peserta didik, 4 konsep berisi mengubah paradigma dari pengajar ke Pembimbing, orang tua dan sahabat anak, orang Dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian, memastikan orang dewasa ikut serta melindungi anak, dan memastikan orang tua dan anak aktif dalam 6 komponen SRA. 5 prinsip SRA berisi non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hidup dan tumbuh kembang anak partisipasi anak dan Pengelolaan Yang baik. 6 komponen SRA Yaitu kebijakan tentang SRA, tenaga pendidik terlatih KHA dan indikator tahapan dalam penerapan SRA. Dampak dari belum terlaksanakannya sesuai dengan 4 rumus SRA yaitu 3 Pilar, 4 konsep, 5 prinsip dan 6 komponen, maka masih ada beberapa sekolah yang tidak aman dan nyaman bagi anak, karena masih adanya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Dalam pelaksanaan Kecamatan Layak Anak dapat dibilang belum optimal, karena masih ada beberapa kecamatan yang tidak mengikutsertakan Forum Anak Kecamatan dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan

alasan tidak mendapatkan izin dari pihak sekolah masing-masing. Hal tersebut membuat Forum Anak Kecamatan tidak ada kegiatan dan dokumentasi untuk diinput kedalam data penilaian KLA. Hal tersebut yang membuat penilaian Forum Anak Kecamatan pada saat penilaian KLA pada tahun 2023 mendapatkan nilai kosong.

Adapun tiga pilar pembangunan dalam penerapan Kota Layak Anak, yaitu Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi, sudah terpenuhi tiga pilar pembangunan tersebut. Adapun beberapa stakeholder yang terkait dalam Pemenuhan Kota Layak Anak di Kota Bekasi yaitu OPD yang terkait Tim Gugus Tugas KLA, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Universitas, KPAD Kota Bekasi, Kepolisian, RSUD dan media masa. Para stakeholder tersebut berkedudukan sebagai Peran Partisipatif dalam pelaksanaan pemenuhan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Peran partisipatif dari para stakeholder ini sangat dibutuhkan dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam pelaksanaan pemenuhan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Setiap stakeholder tersebut sudah memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Seperti OPD Tim Gugus Tugas KLA yang memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menerapkan Kota Layak Anak di Kota Bekasi, dengan menjalankan program-program pemenuhan hak anak sesuai 5 klaster KLA dengan dinas-dinas yang sesuai dengan bidangnya. Pentingnya tanggung jawab dari setiap OPD Tim Gugus Tugas KLA karena pada setiap OPD tersebut memiliki data-data mengenai pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh setiap OPD Tim Gugus Tugas KLA. Setiap data tersebut sangat penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi karena pada saat evaluasi atau penilaian Kota Layak Anak, data-data dari para OPD Tim Gugus Tugas KLA yang akan dimasukkan kedalam penilaian tersebut.

Dalam menjalankan KLA di Kota Bekasi, masyarakat harus mengetahui perkembangan dari pelaksanaan KLA sampai saat ini, maka untuk mempublish

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, OPD Tim Gugus Tugas KLA dan stakeholder lainnya mengenai perkembangan pelaksanaan dan pemenuhan KLA di Kota Bekasi sampai saat ini. Maka diadakan kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dengan media masa. Media masa sangat penting bagi masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, karena media masa yang berperan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai perkembangan KLA. Media masa yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sampai saat ini ialah Radio Dakta dan Bekasi keren. Dengan adanya media masa akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan KLA di Kota Bekasi.

Adapun peran pasif dalam pelaksanaan pemenuhan KLA di Kota Bekasi dijalankan oleh Forum Anak yang berada dibawah naungan DPPPA Kota Bekasi. Forum Anak dalam upaya pemenuhan KLA melaksanakan kegiatan Forum Anak Go To School, kegiatan tersebut sebagai upaya membantu DPPPA Kota Bekasi dalam pemenuhan KLA di Kota Bekasi dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang berada diwilayah Kota Bekasi, selain itu kegiatan tersebut menjadi upaya untuk mengajak anak untuk mengikuti kegiatan Forum Anak Kota Bekasi.

Adapun dalam pelaksanaan pemenuhan KLA di Kota Bekasi terdapat beberapa hambatan yaitu masih terdapat kasus kekerasan dilingkungan sekolah, masih banyaknya eksploitasi anak dengan mempekerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan merenggut anak dari masa anak-anaknya, masih banyaknya iklan rokok di sepanjang jalan Kota Bekasi, tidak terlaksanakannya dengan baik program Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Layak Anak di Kota Bekasi, keterbatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat, masih ada beberapa masyarakat yang tidak berani untuk melapor dan peka apabila melihat atau mengalami kekerasan dan ada beberapa rumah pintar yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsi awalnya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Dalam Memenuhi Kota Layak Anak Di Kota Bekasi belum dapat dikatakan optimal. Maka berikut beberapa saran yang diberikan oleh peneliti untuk perkembangan selanjutnya :

1. Diharapkan membuat produk hukum yang mengatur Tugas dan Fungsi Tim Gugus Tugas KLA dalam pelaksanaan KLA di Kota Bekasi. Selain itu, DPPPA Kota Bekasi harus lebih merangkul serta melakukan komunikasi intensif dengan para Tim Gugus Tugas KLA dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Bekasi menjadi lebih optimal dan mampu meningkatkan predikat KLA di Kota Bekasi.
2. Membuat produk hukum secara mendetail mengenai larangan iklan rokok difasilitas umum dan sepanjang jalan di wilayah Kota Bekasi, hal ini harus dibuat agar iklan rokok di fasilitas umum berkurang dan membuat Kota Bekasi menjadi ramah anak. Harus adanya produk hukum yang mengatur iklan rokok dikarenakan, rokok akan memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak.
3. Diharapkan untuk segera membangun UPTD PPA di Kota Bekasi untuk membantu DPPPA Kota Bekasi dalam melakukan penanganan kasus dan Diharapkan untuk menyediakan fasilitas berupa ruangan kosong untuk dijadikan ruangan penanganan kasus yang mampu menampung para pelapor dan korban.